

BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai penolakan India terhadap strategi pembangunan global *Belt and Road Initiative* dalam kurun waktu 2017-2020, dapat disimpulkan bahwa India sebagai negara yang berdaulat tidak ingin bekerjasama dalam program ini dikarenakan India berspekulasi bahwa dibalik program ini terdapat *Hidden Agenda* tersembunyi yang akan dilakukan oleh Cina pada negara-negara yang dilaluinya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kepentingan strategis yang menyebabkan India menolak BRI dan terdapat wujud penolakan India terhadap strategi yang ditafsir lebih dari \$100 miliar tersebut. Kepentingan strategis yang menyebabkan India menolak BRI ini dibagi menjadi tiga kepentingan yaitu, Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Politik dan juga Kepentingan Integritas Wilayah. Dalam penolakannya terdapat beberapa wujud penolakan yang dibuat oleh India seperti hengkangnya India dalam program ini dan pengeluaran *white paper* oleh India dalam meresponi BRI.

Dimulai dari Kepentingan Ekonomi yang merupakan salah satu kepentingan mengapa India menolak BRI dikarenakan India berpikir bahwa skema tersebut akan memungkinkan Cina meningkatkan pengaruhnya di kawasan Samudera Hindia maupun Asia hingga merugikan India, karena Cina sendiri dapat memberikan dukungan finansial untuk menarik negara-negara Asia Selatan lainnya

yang tidak dapat ditandingi oleh India, yang mana negara-negara ini akan lebih mendukung Cina dibandingkan dengan India. India juga dijadikan target bagi Cina dikarenakan India memiliki populasi terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Cina sendiri sampai sekarang masih menjadi mitra dagang terbesar India dan 90% produk harian India masih di buat oleh Cina.

Dalam Kepentingan Politik dari adanya BRI membuat India sebagai negara yang dilaluinya menolak akan hal ini. Kepentingan Cina yang ingin mendikte dan juga mengatur negara peminjam agar dapat mudah masuk dalam bidang politik dan ekonomi sebuah negara, yang bertujuan untuk memperkuat posisi Cina dalam dunia Internasional. *Debt Trap* merupakan salah satu cara Cina untuk menjatuhkan negara-negara yang dilewatinya, dan alhasil setidaknya sebanyak 150 negara di seluruh dunia berutang kepada Cina. Sebenarnya kepentingan Kepentingan strategis politik yang dimiliki oleh India juga dipengaruhi oleh ketegasan sikap India di bawah kepemimpinan Narendra Modi, dimana beliau diusung oleh *Bharatiya Janata Party* (BJP) dengan idealisme berupa semangat nasionalisme, dituntut untuk memenuhi anemo pendukungnya yang memintanya untuk tegas. Karena jika ini tidak dilakukan, akan ada peluang baginya untuk tidak terpilih lagi pada pemilihan umum 2019. Maka dari itu beliau memilih untuk tidak menghadiri KTT BRI di Beijing pada 2017 lalu. Hal ini dilakukan agar menyatakan kepada dunia, khususnya Cina bahwa BRI bukanlah satu-satunya pemain di kawasan itu. Sehingga hal ini yang menjadi “*Benchmark*” dari kepemimpinan Modi.

Keuntungan geostategis juga mengartikan bahwa Geostrategi merupakan strategi bisnis dengan memakai semua keterampilan maupun sumber daya manusia ataupun alam untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. BRI ini merupakan Geostrategi Cina dalam meningkatkan kekuatannya secara eksternal, namun Geostrategis India menolak adanya BRI dikarenakan material India akan tersaingi dari segi Militer, Ekonomi, dan Politik. Faktor geostategis ini akan mempengaruhi biaya internal militer Cina yang saat ini menduduki peringkat kedua di dunia, sedangkan India masih mengejar kekayaan materialnya dengan membangun ekonominya di kawasan Asia maupun global.

Keuntungan Integritas Wilayah juga merupakan salah satu pertimbangan India dalam menolak BRI. Beberapa hal yang mendasari India menganggap bahwa jika India bergabung dengan strategi ini salah satu dari faktornya adalah Integritas Wilayah mereka akan terganggu, sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu perhatian India mengenai BRI ini antara lain seperti, Melanggar norma dan standar internasional, Merusak klaim kedaulatan India atas wilayah perbatasan yang disengketakan jika bergabung dengan inisiatif saat CPEC melewati *Pakistan occupied Kashmir* (POK) dan Memberi Cina pengaruh geopolitik dan ekonomi yang besar terhadap pengambilan keputusan di negara tetangga India.

Dari adanya tiga keuntungan tersebut membuat India menolak Kerjasamanya dengan Cina, India sendiri mengeluarkan beberapa wujud dalam penolakannya. Pertama yaitu hengkangnya India dalam BRI, bisa kita lihat bahwa India sudah sebanyak tiga kali hengkang dari rapat Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan Cina sebagai pertemuan antar negara dalam rangka rapat Kerjasama

BRI. Sebagaimana pun India tetap mendukung penuh segala Kerjasama internasional, India sendiri melihat bahwa Kerjasama antara negara ini tidak akan menghasilkan *mutual benefit* jika itu tidak mendasar pada norma yang telah diakui oleh komunitas internasional seperti pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan mengarah pada keuntungan bersama. Demikian juga hal tersebut yang menjadi suatu alasan mengapa India memilih hengkang dalam Kerjasama ini dikarenakan tidak adanya “*blue print*” maupun detail yang lebih rinci yang menyangkut operasional setelah BRI ini berjalan. Kurangnya informasi spesifik membuat India bertanya-tanya apakah mungkin keseluruhan proyek ini hanyalah permainan Cina saja.

Pengeluaran *White Paper* oleh pemerintah India merupakan salah satu tanda yang dilakukan oleh pemerintah India dalam meresponi BRI tersebut. Pemerintah dari India menegaskan pendiriannya belum berinisiatif untuk turut berkontribusi dalam *Belt and Road Initiative* sejak pertama kali BRI ini diluncurkan pada tahun 2013 yang dibuktikan dengan *white paper* yang dikeluarkan sendiri oleh India guna meresponi BRI yang digagas oleh negeri tirai bambu tersebut. India melihat bahwa BRI telah melanggar prinsip dasar yaitu mengenai Integritas Kedaulatan dan Wilayah. India sendiri adalah negara yang berdaulat, ia memilih untuk tidak bergabung dengan BRI karena melanggar prinsip yang akan merugikan negaranya. Wujud penolakan yang dilakukan oleh pemerintah India adalah memperlihatkan ketegasannya dengan mengeluarkan *white paper*.

India sendiri masih melakukan Kerjasama dengan negara-negara lain. Seperti yang diketahui bahwa India sendiri masih ingin mempertahankan kekuatan

ekonominya dengan cara memperkuat Kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional yang ada seperti *South Asian Free Trade Area (SAFTA)*, ASEAN, *India Free Trade Agreement (AIFTA)*, dan *Logistic Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA)*.

Salah satu contoh yang sudah terjadi bahwa India tidak mau berakhir seperti negara tetangganya yaitu Sri Lanka. Negara tersebut tidak dapat melunasi utangnya dari negara Cina. Berawal dari adanya Kerjasama Cina dan Sri Lanka sampai berakhir tidak bisa membayar hutang-hutang negara tersebut karena adanya keterlambatan ekonomi. Pada akhirnya, sebagai jaminan untuk melunasi utang tersebut Sri Lanka memutuskan untuk mengizinkan perusahaan Cina memiliki total 80% saham dan menyewa Pelabuhan di Hambatota selama 99 tahun, yang akhirnya menyebabkan kemarahan public dan adanya protes di Sri Lanka.

Dapat dikatakan sebenarnya India masih mempercayai Cina untuk bekerjasama dalam hal perekonomian. Salah satunya bisa dilihat sampai sekarang masih terjadi ekspor dan impor antara Cina dan India yang dimana Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar untuk India. India sendiri memakai 90% produk harian mereka yang dibuat di Cina, seperti peralatan elektronik, mesin, plastik, peralatan medis, dan masih banyak yang lainnya. Fakta kedua yang bisa diambil adalah bahwa India masih mempercayai Cina dengan ikut bergabung ke dalam *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, yang dipercaya bahwa meskipun Cina memiliki saham mayoritas sebesar 30% di dalam bank tersebut tetapi Cina sendiri tak akan mendominasi syarat maupun juga ketentuan dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh AIIB, dapat dikatakan bahwa AIIB merupakan “pinjaman yang

tidak mengikat”. Kemudian para peneliti juga mempercayai bahwa sebenarnya India masuk ke dalam AIIB ini dikarenakan peminjaman uang di Bank Cina tersebut dapat membantu pembangunan infrastruktur.

Namun India dalam hal yang menyangkut keamanan integritas wilayah sangat tidak mempercayai Cina sebagai salah satu negara untuk bekerjasama dengan India, seperti yang sudah di paparkan paragraph di atas bahwa banyak sekali kasus-kasus yang muncul karena adanya BRI ini sebagai salah satu hubungan Kerjasama antar-negara. Dapat dilihat sangat jelas dan dapat ditarik secara kesimpulan bahwa Cina sendiri memiliki *Hidden Agenda* di dalam strateginya, yang mana BRI ini merupakan strategi yang melewati negara-negara Asia, Afrika maupun Eropa. Cina sebagai pelopor strategi ini meminjamkan uangnya atau bisa dikatakan menaruh modal di negara-negara yang dilewatinya dengan melakukan pembangunan besar-besaran di negara-negara. Jika negara tersebut pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan utang yang sudah diberikan oleh Cina maka sebagai gantinya asset-aset negara yang dimiliki oleh negara tersebut akan ditarik secara paksa oleh Cina sebagai hak milik dari Cina selaku penanam modal (*Debt Trap*). Contoh lain yang dapat diambil yaitu Afrika, yang merupakan salah satu negara yang dilewati oleh BRI. Dimana Pemberian pinjaman Cina ke Afrika didorong oleh pembiayaan lebih dari 3.000 proyek infrastruktur di mana Cina telah memberikan lebih dari \$86 miliar. Pada tahun 2012, saat Cina menjadi mitra dagang terbesar Afrika, perdagangan AS-Afrika mulai menurun. Alasan utamanya adalah ekspansi cepat produksi minyak dalam negeri Amerika, yang menyebabkan penurunan tajam dari impor minyak Afrika. Selain itu, dampak krisis ekonomi global yang

berkepanjangan membatasi energi Barat untuk pembiayaan Afrika. Cina dengan sengaja meminjamkan modalnya bagi negara-negara yang menurut mereka sendiri tidak mampu membayar dan kemudian menuntut konsensi ketika mereka gagal.

V.2 Saran

Sebagai salah satu negara maju di dunia, Cina sebagai pelopor strategi pembangunan global *Belt and Road Initiative* memiliki sikap yang lebih netral dengan negara lain. Seperti yang diketahui bahwa Cina merupakan salah satu negara yang dikatakan maju yang sekarang memiliki perang dagang dengan Amerika sebagai lawan dalam perekonomiannya. Maka dari itu sebetulnya sah-sah saja jika memiliki ambisi "*the most powerful country*" ingin diikuti oleh Cina untuk mengikuti Amerika yang sekarang menjadi salah satunya. Tetapi seharusnya Cina sebagai negara yang berdaulat juga melihat faktor-faktor dan rekam jejak apa saja yang mereka rangkai untuk negara-negara lain yang terkena imbas dari adanya BRI ini, seperti melihat faktor-faktor yang terjadi apakah merugikan negara-negara yang dilaluinya atau tidak.

Saran dari penulis terhadap negara Cina yaitu, perlunya kejelasan Cina dalam perjanjian peminjaman modal dari BRI. Apalagi negara yang meminjam uang menerima dalam bentuk mata uang asing, contohnya Indonesia. Hal tersebut dapat menyebabkan tindak korupsi jika tidak terdeteksi dengan tepat anggaran yang diterima. Cina harus bisa mengontrol kekuasaannya, tidak semua negara suka diatur oleh negara lain, Cina harus menghargai kedaulatan dan integritas setiap wilayah. Jika Cina terus melakukan cara "*Debt Trap*" terhadap banyak negara, maka negara-

negara yang lain akan pesimis di awal seperti contohnya India. Sebagai saran penulis jadikanlah sebuah Kerjasama sebagai kesempatan untuk memupuk kepercayaan, bukan tempat untuk menjebak kawan maupun lawan. Sebagai negara maju yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah. Berbagai macam cara dilakukan Cina agar dapat bangkit, sehingga tak heran jika Cina mendapat slogan “Jauh sebelum Cina jadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi mengagumkan, Napoleon Bonaparte pernah meramal nasib Negeri Tirai Bambu tersebut. Kini, ramalan sang ahli strategi perang Perancis ini pun terbukti.

